



**POTENSI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK
KAMPUNGWOGEKEL, DISTRIK ILWAYAB, KABUPATEN MERAUKE**

Sebestina Siman¹⁾ dan Hendricus Lembang²⁾

Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Musamus Merauke

Email : estisiman@gmail.com dan hendricuslembang@unmus.ac.id

ABSTRACT

The village has the authority to manage the existing potential for public welfare. So that the village government can form economic institutions, namely Village Owned Enterprises (BUMK). Kampung Wogekel has marine and swamp fisheries resources. The study uses a PRA approach based on community participation with SWOT analysis. The results of this study found: Strength Aspects namely 1). Sufficient labor is available, 2). The productive age potential of coastal communities, 3). Natural resources are very available, 4). Public facilities such as ports, Pertamina logistics, banking institutions, 5). Fishing boats belonging to the village. Weakness aspects are: 1). Weak capital, 2). Fisheries business technology is still simple, 3). Electricity, ice factories and shelters and storage vessels, 4). Limited access to marketing, 5). Community culture that does not have entrepreneurial spirit. Opportunity Aspect: 1). Job opportunities, 2). Natural resources have not been fully utilized, 3). Authority to establish BUMK, 4). Government support. Threat aspects, namely: 1) Low fish prices, 2). Weather and bad season, 3). There is still massive fishing to only take bubbles and also illegal fishing, 4). Central government regulation of the moratorium has not been revoked. So that the potential business sector is a fish shelter business. While alternative businesses are salted fish, coarse salt, nine household basic needs, tubers and crabs.

Keywords: *Development, economic institutions, entrepreneurship*

A. PENDAHULUAN

Kebijakan pembangunan daerah diarahkan untuk mengembangkan daerah dengan mengoptimalkan pemberdayaan potensi yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. [1]Untuk itu, kampung diberi ruang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Amanat undang-undang Desa No 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa atau kampung telah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setmpat. [2]Dalam kewenangan tersebut, kampung melaksanakan urusan-urusan pemerintahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat serta melakukan pemberdayaan masyarakat.[3]

Kewenangan tersebut dapat dilakukan oleh pemerintahan kampung untuk membentuk kelembagaan ekonomi seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau badan Usaha Milik Kampung (BUMK) untuk mengelola potensi sumber daya alam yang ada.[4]Sehingga pendirian BUMK dapat digunakan untuk pengembangan usaha serta pembangunan kampung, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.[5]*BUMK merupakan kelembagaan ekonomi di tingkat kampung, memiliki badan hukum dan bergerak di dalam bidang usaha untuk memberikan kemudahan akses terutama distribusi barang dan jasa serta memudahkan warga untuk memasarkan produksi dan komoditasnya. Sehingga mampu memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan untuk menjadi motor penggerak ekonomi di kampung.*

Selain itu pula ada faktor-faktor utama lambatnya pergerakan ekonomi di tingkat kampung Wogekel dikarenakan kualitas sumber daya manusia rendah, fasilitas infrastruktur publik yang sangat minim, struktur perekonomian kampung hanya mengandalkan sektor primer sehingga tidak variatif kegiatan-kegiatan

ekonomi produktif kampung, lembaga-lembaga baik keuangan/ekonomi maupun sosial sangat minim di kampung. Begitu pula faktor kondisi geografis yang kurang mendukung, serta sulitnya akses transportasi darat, udara maupun laut dari kampung ke pusat kota Kabupaten Merauke yang sangat jauh sehingga sulit dijangkau untuk memasarkan maupun membeli berbagai kebutuhan hidup. Minimnya akses pasar sebagai tempat penyaluran barang dan juga pemenuhan kebutuhan membuat masyarakat di kampung tersebut terkesan terisolasi dalam mendapatkan aksesibilitas layanan publik bidang ekonomi. Harga kebutuhan hidup yang mahal tidak sebanding dengan sumber pendapatan, sehingga masyarakat di kampung hidup dengan pola sistem ekonomi konsumtif. Sebagai konsekuensinya, kampung menjadi kantong pemukiman masyarakat yang kurang beruntung.

Sementara Kampung Wogekel memiliki kekayaan alam yang berpotensi untuk dikembangkan, seperti ikan, hasil hutan, perkebunan serta potensi parawisata. Karena itu, perlu kenaikan pendapatan per kapita dapat menaikkan standar hidup riil masyarakat apabila pendapatan per kapita meningkat. [6] Sisi lain kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo, dalam Nawacita yang ketiga, yakni; “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan”. Maka pemerintah pusat telah mengalokasikan Dana Desa (DD) yang cukup besar bagi pembangunan di desa/kampung. Serta didukung dengan Alokasi Dana Kampung (ADK) yang bersumber dari APBD Kabupaten Merauke. Ketersedian sumber daya alam yang didukung dengan ketersedian anggaran yang besar di kampung (APBK), juga belum mampu mendongkrak ekonomi masyarakat kampung.

*Oleh sebab itu sangat diharapkan ada suatu lembaga atau badan usaha yang dapat berfungsi sebagai distribusi dan pemasaran komoditi dari produsen ke konsumen. Lembaga ekonomi ini yaitu BUMK dapat menangani seluruh kepentingan masyarakat yang berperan mulai dari sektor hulu (*up-stream*) sampai ke sektor hilir (*down-stream*) dari aktivitas pengembangan usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan aktivitas ekonomi produktif lain. BUMDes sebagai lembaga sosial memiliki kontribusi sebagai penyedia pelayanan sosial,*

sementara fungsi sebagai lembaga komersial. [7]Kegiatan ini dapat mulai dari penyediaan modal, penyediaan sarana produksi, pengelolaan alat dan mesin, pengolahan hasil dan pemasaran produksi serta mengembangkan usaha lainnya sesuai dengan potensi dan perkembangan kampung.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif. Desain penelitian tentang pemetaan potensi dan pemilihan bidang usaha di Kampung Wogekel, Distrik Ilwayab. Kajian ini dengan menggunakan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang berbasis pada partisipasi masyarakat. Pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat secara bersama-sama menganalisis masalah kehidupan dalam rangka merumuskan perencanaan dan kebijakan secara nyata.

Metode pendekatan ini juga digunakan untuk memahami desa/kampung secara partisipatif, dalam hal permasalahan dan upaya antisipasi yang dibutuhkan, dengan mendasarkan pada potensi dan kendala sumber daya yang tersedia. Karena PRA adalah suatu metode pendekatan dalam proses pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, yang tekanannya pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan pembangunan. Chambers menyatakan pada intinya PRA adalah merupakan pendekatan yang memungkinkan masyarakat desa untuk saling berbagi, meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan kehidupan desa, serta membuat rencana dan tindakan secara partisipatif (Djohani, Rianingsih, 1996).

Dengan menggunakan metode PRA maka peneliti mampu beradaptasi dan fleksibel mengembangkan teknik PRA dengan kondisi-kondisi riil di kampung tersebut. Karena Teknik PRA bertujuan untuk pengembangan program bersama masyarakat. Dengan demikian proses pembentukan kelembagaan ekonomi di kampung melalui BUMK yang akan mengacu pada kajian pemetaan potensi dan pemilihan bidang usaha di kampung tersebut.

Teknik PRA yang akan digunakan untuk melakukan kajian pemetaan potensi dan pemilihan bidang usaha antara lain: (1) Pemetaan: Geografis, Demografis, Penyebaran Etnis, Sosial Ekonomi, Aksesibilitas, sarana dan

prasarana, pasar, kelembagaan pemerintah, kelembagaan komunitas adat, *agent of changes* (tingkat pendidikan SMP ke atas). (2) Potensi Wilayah/SDA: Aksesibilitas (infrastruktur jalan, telekomunikasi, energi listrik), Pasar, Modal, SDM, Regulasi. (3) Komitmen para pihak pemangku kepentingan(*stakeholders*): Pemerintah daerah Kabupaten dan distrik, Pemerintah kampung, Pihak swasta, Masyarakat, dan. (4) Peluang dan ancaman serta Kelemahan dan kekuatan dilakukan dengan pedekatan Analisis SWOT, yang kemudian menjadi bahan rekomendasi.

C. PEMBAHASAN

Pemetaan Letak Geografis Kampung

Kampung Wogekel terletak pada wilayah pesisir pantai. Kampung Wogekel adalah salah satu Kampung yang terletak di wilayah Distrik IIwayab Kabupaten Merauke dengan luas wilayah adalah ± 36 Ha dengan batas-batas wilayah kampung sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Nakias
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Laut Muli
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Bibikem
- Sebelah Sarat berbatasan dengan Kampung Wanam

Jika dilihat dari letak geografinya Kampung Wogekel termasuk daerah daratan yang memiliki ketinggian antara 10 - 15 mdpl. Dalam sejarah kampung, Wogekel yang dalam bahasa setempat disebutkan “Gigit Bibir”. Kampung tersebut telah dimekarkan dari kampung Wanam pada tahun 2000.

Pemetaan Demografis

Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan. Penduduk dibagi atas kelompok-kelompok tertentu, atau dapat dikatakan atas komposisi penduduk tertentu. Susunan penduduk tersebut menggambarkan pengelompokan penduduk menurut karakteristik yang sama seperti jenis kelamin, dan mata pencaharian.

Jumlah penduduk pada suatu kampung akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, termasuk di kampung. Kondisi demografi Wogekel berdasarkan hasil sensus partisipatif yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Wogekel tahun 2014, tercatat jumlah penduduk Kampung Wogekel sebanyak 2.479 jiwa, dengan perbandingan laki-laki 1.382 jiwa dan perempuan sebanyak 1.097 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga (KK) yaitu sebanyak 691 Kepala Keluarga. Kampung Wogekel tahun 2016, tercatat jumlah penduduk Kampung Wogekel sebanyak 2.897 jiwa dengan perbandingan laki-laki 1.516 jiwa dan perempuan sebanyak 1.381 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga (KK) yaitu sebanyak 805 Kepala. Setelah tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah penduduk menjadi 3.349 jiwa dengan perbandingan laki-laki 1.982 jiwa dan perempuan sebanyak 1.367 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga (KK) yaitu sebanyak 302 Kepala Keluarga. Kampung Wogekel merupakan kampung lokal karena maka mayoritas masyarakat Asli Papua dengan mata pencaharian sebagai nelayan dan pekebun. Walaupun terdapat masyarakat dari non Papua sebagai pedagang, PNS maupun swasta.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
di Kampung Wogekel

No.	Uraian	Jumlah
1.	Laki-Laki	1.982
2.	Perempuan	1.367
3.	Kepala Keluarga (KK)	302

Sumber: diolah dari data RPJMK Tahun 2015 dan observasi.

Penyebaran Etnis

Penyebaran etnis-etnis di Papua mengikuti topografi daerahnya, ada etnis-etnis yang mendiami pesisir pantai dan pulau-pulau. Ada pula etnis-etnis yang mendiami daerah-daerah pedalaman termasuk daerah penggunungan dan lembah.

Etnis-etnis itu secara turun-temurun menempati wilayah tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk kelangsungan hidup mereka. Dalam peradaban pra modern, etnis-etnis di selatan Papua khususnya di Kabupaten Merauke mulai menjalin kontak dengan dunia luar. Secara historis kontak pertama penduduk pribumi (Malind Anim) dengan para pendatang beragam bentuk, yakni; kontak pertama melalui penyebaran agama, yaitu dengan hadirnya para misionaris Katolik pertama dari negeri pada tahun 1892.

Setelah tahun 1902, para misionaris tersebut mulai menetap di Merauke serta mulai melakukan kunjungan-kunjungan disertai dengan membuka basis pelayanan atau stasi di kampung-kampung. Selain evangelisasi, para misionaris juga membuka sekolah-sekolah, demi keperluan pendidikan. Sisi lain terjadi kontak antar penduduk Papua dengan etnis-etnis lain, seperti; etnis Cina dan Timor yang datang untuk mencari buluh burung cenderawasih. Para pemburu melakukan perjalanan sampai di kampung-kampung untuk mencari burung cenderawasih.

Bentuk penyebaran etnis juga terjadi pada masa transisi kekuasaan dari Pemerintah Belanda ke Pemerintah Indonesia. Kebijakan pemerintah pusat dengan mendatangkan guru-guru Katolik dari daerah Jawa untuk ditempatkan di Papua, khususnya di daerah-daerah pedalaman Merauke. Langkah tersebut diikuti dengan kebijakan pemerintah pusat dengan pembukaan lokasi-lokasi transmigrasi. Selain petugas-petugas, para pedagang-pedagang non papua juga menjual dagangannya ke kampung-kampung, bahkan menetap sebagai penduduk kampung setempat.

Uraian di atas menggambarkan penyebaran etnis di kampung-kampung, baik kampung lokal maupun kampung eks trans. Penyebaran etnis di kampung Wogekel bersifat heterogen, baik etnis Marind sendiri, maupun etnis-etnis Papua lainnya, bahkan etnis-etnis non Papua. Penyebaran etnis yang terjadi di kampung Wogekel, karena hadirnya Perusahaan PT.DJARMA ARU, sebagai perusahaan ikan. Perusahaan tersebut banyak menyerap banyak tenaga kerja yang berasala dari luar Papua. Heterogenitas etnis di Kampung Wogekel terlihat juga dari data yang disajikan di bawah ini:

Tabel 2

Jumlah Keluarga Berdasarkan Agama dan Keyakinan

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Protestan	389	277	666
2	Katholik	411	392	803
3	Islam	596	405	1.001
4	Budha	9	-	9
5	Hindu	-	-	-
JUMLAH		1.405	1.074	2.479

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus Penduduk Kampung Wogekel Tahun 2014 (RPJMK tahun 2015)

Dari tabel di atas, tidak disajikan secara detail tentang sebaran jumlah etnis di Kampung Wogekel, tetapi dari jumlah pengikut beragama Islam dan Budha dapat dikatakan bahwa pemeluk agama tersebut adalah etnis non Papua. Sejalan dengan hasil observasi di lapangan, bahwa mayoritas etnis non Papua adalah beragama Islam. Penyebaran etnis Papua dan non Papua di Kampung Wogekel telah menimbulkan nilai-nilai kepercayaan (*trust*) dalam masyarakat, karena didukung oleh norma-norma yang saling mengikat di tengah-tengah masyarakat.

Kelembagaan sebagai Agen Pembaharu

Kehadiran lembaga-lembaga baik pemerintahan, ekonomi, sosial, politik, adat, pemuda, perempuan, agama dan alain sebagainya akan sangat menentukan perubahan transformasi yang cepat di suatu daerah. Lembaga-lembaga ini akan berfungsi sebagai agen-agen pembaharu (*agents of change*). Sehingga semakin banyak lembaga-lembaga di suatu kampung akan lebih baik dalam mendorong perubahan yang lebih baik.

Kelembagaan kampung dalam bentuk struktur organisasi tetapi kelembagaan kampung yang paling dekat dengan masyarakat. Di Kampung Wogekel terdapat sejumlah organisasi dan lembaga di Kampung Wogekel, baik formal maupun non-formal, yang mempunyai peran dan fungsi untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Pembentukan masing-masing organisasi atau lembaga tersebut dibedakan atas : organisasi/lembaga yang

dibentuk atas .inisiatif murni masyarakat guna memenuhi kepentingan masyarakat, organisasi lembaga yang muncul dan tumbuh atas inisiatif masyarakat dan didukung secara operasional dan finansial oleh “pihak luar” (pemerintah daerah), dan organisasi/lembaga yang merupakan bentukan pihak luar yang inisiatif pembentukan tidak berasal dari masyarakat.

Terdapat kurang lebih 12 lembaga/organisasi di Kampung Wogekel.

1. Pemerintah Kampung
2. Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM)
3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4. Dewan Gereja
5. Lembaga ADAT
6. Posyandu
7. Lembaga Pendidikan: SD dan SMP NEGERI WANAM
8. Kelompok Nelayan
9. Kelompok Tani
10. Kelompok Ternak
11. Kelompok Berburu
12. Kelompok Pemuda

Kemudahan Aksesibilitas

Kampung Wogekel sangat berkembang pesat menjadi kota kecil yang tumbuh melijit dari seluruh kampung yang ada di Kabupaten Merauke. Hal ini sangat didukung oleh kehadiran perusahaan besar ikan yaitu PT. Djarma Aru pada tahun 1994 yang beroperasi pada tahun 1996 dan kemudian diambil alih oleh PT. Dwikarya Reksa Abadi yang beroperasi pada tahun 2007. PT. Dwikarya Reksa Abadi merupakan perusahaan asing yang bergerak di bidang perikanan laut. Kehadiran perusahaan ini di Kampung Wogekel sangat menentukan dan besar sekali peranannya dalam menggerakkan kegiatan ekonomi kampung maupun kampung-kampung lainnya.

Oleh karena hampir seluruh fasilitas infrastruktur penggerak ekonomi disediakan oleh perusahaan tersebut seperti pelabuhan, bandar udara, listrik, air bersih dan lain sebagainya. Namun setelah kebijakan Moratorium yang

dikeluarkan oleh Menteri Perikanan dan juga perusahaan tersebut masih tersandung masalah hukum. Sehingga perusahaan tersebut tidak beroperasi sejak tahun 2014.

Akibat perusahaan tidak beroperasi maka aktivitas ekonomi lumpuh di Kampung Wogekel, roda ekonomi berjalan lambat dan pertumbuhan ekonomi yang bergerak stagnan. Faktor yang paling terasa bagi masyarakat terutama masyarakat lokal adalah sulitnya memasarkan hasil-hasil tangkapan mereka, karena selama ini seberapa pun besar hasil tangkapannya maupun jenis ikan manapun hampir seluruhnya dapat diterima atau dibeli oleh perusahaan tersebut. Namun saat ini, mereka tidak bisa lagi meningkatkan produksi tangkapan karena sulit memasarkan yang hanya dijual di sekitar pasar kampung dengan suplai (*supply*) ikan yang lebih banyak dari pada yang meminta (*demand*).

Kurangnya pasar ataupun pembeli juga diperparah oleh aktivitas masyarakat yang semakin menurun daya belinya akibat banyak karyawan yang telah dirumahkan atau dilakukan Pemutusan Hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan. Jumlah karyawan yang cukup banyak merupakan salah satu segmen pasar untuk menjual hasil tangkapan maupun hasil-hasil kebun serta hasil buruan masyarakat lokal di wilayah Kampung Wogekel.

Masyarakat Wogekel pun yang sebagian besar menggantungkan hidupnya sebagai nelayan tidak dapat menangkap ikan lebih banyak karena tidak bisa bertahan lama. Oleh karena tidak dapat lagi memperoleh es balok untuk dimasukkan ke dalam *cool box* yang nantinya menjadi pendingin agar ikan bertahan lama dan tetap segar. Sehingga mereka menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Walaupun demikian, secara umum Kampung Wogekel memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai. Kampung Wogekel memiliki 1 poros jalan utama kampung yang lebarnya sekitar 2 meter dan panjang sekitar 1000 meter di mana terdapat total 60 kavling rumah dengan luas pekarangan masing-masing 20x50 meter yang terletak di sisi kanan kiri jalan. Dari 60 kavling yang ada yang sudah mendapatkan rumah bantuan sejumlah 20 rumah dengan konstruksi lantai cor-coran semen dan dinding setengah batu

beratapkan seng gelombang dan dilengkapi MCK. Untuk penyediaan listrik di Kampung yang sangat terbatas karena hanya 1 diesel PLTD kampung.

Sarana umum yang ada di Kampung Wogekel sebagian besar disediakan oleh perusahaan PT. Dwikarya Reksa Abadi seperti bandar udara, pelabuhan laut dan ikan, rumah sakit perusahaan, listrik dan air bersih. Sedangkan sarana dan prasarana lainnya yang menunjang roda perekonomian di Kampung Wogekel adalah adanya SPBU pertamina dengan harga subsidi BBM, Kantor Pos, Kantor Kas Bank Papua. Sarana dan prasarana publik yang disediakan pemerintah seperti pasar, Gedung SD dan SMP serta puskesmas ada di Kampung Wogekel. Selain itu pula ada lembaga/badan keamanan di Kampung Wogekel seperti Kantor Kepolisian, Kantor TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut serta Kantor Polisi Air dan Udara. Lembaga keamanan ini akan memberikan jaminan keamanan dan ketertiban serta akan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Pasar

Pasar merupakan salah satu aspek penting di dalam mempertimbangkan suatu usaha ekonomi yang dapat memungkinkan untuk menjual hasil-hasil produksi baik berupa barang maupun jasa. Di Kampung Wogekel terdapat pelaku bisnis besar seperti Toko Lima, Toko Sahabat dan Toko Baru dan hampir mencapai 50 kios yang bergerak di bidang perdagangan di Kampung Wogekel. Sehingga Kampung ini merupakan salah satu kota kecil yang sedang tumbuh sebagai pusat ekonomi daerah sekitarnya. Ditinjau dari aspek jumlah penduduk Kampung Wogekel yaitu sebanyak 2.897 jiwa tahun 2016 yang merupakan kampung terbanyak jumlah penduduknya. Dari aspek ini akan menjadi potensi pasar internal yang cukup besar. Selain itu, Kampung Wogekel memiliki aksesibilitas yang mudah baik laut maupun udara sehingga kampung-kampung yang ada di Distrik Ilwayab seperti: Kampung Wanam, Kampung Padua, Kampung Bibikem dan Kampung Ulili. Kampung-kampung yang ada Distrik Tabonji seperti Kampung Tabonji, Kampung Bamol, Kampung Yamuka, Kampung Iromoro, Kampung Wanggambi, Kampung Yeraha, Kampung Konjombando serta Kampung Suam. Sedangkan Distrik Kimam seperti dari Kampung Kimam sendiri, Kampung Kiworo, Kampung Mambum, Kampung Woner, Kampung Deka, Kampung Subodon, Kampung Teri, Kampung Turiram,

Kampung Kalilam, Kampung Kumbis dan Kampung Komolom. Sedangkan Distrik Merauke tetap menjadi salah satu target segmen pasar paling potensial karena memiliki jumlah penduduk yaitu sebesar 98.478 jiwa pada tahun 2016.(BPS Merauke Dalam Angka 2017). Dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan beragam di distrik ini menjadi potensi pasar untuk komoditi hasil-hasil dari Kampung Wogekel.

Modal

Modal merupakan salah satu faktor produksi dan menjadi sumber daya yang akan menentukan kegiatan usaha berhasil. Besarnya modal akan memungkinkan pula aktivitas usaha akan dapat bergerak lebih besar pula dan peluang untuk mendapatkan laba/profit pun besar. Untuk masing-masing modal dari kelima kampung tersebut dapat dilihat besarnya dana yang terdiri atas dana desa (DD), Alokasi Dana Kampung (ADK), ADK silfa serta dana BANGSAKU yang dikelola oleh perintah kampung dalam satu tahun. Berikut ini potensi modal untuk mengelola BUMK sebagai lembaga ekonomi milik kampung dapat dilihat di dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3

**Rekapitulasi DD, ADK dan Dana BANGSAKU
Silfa 2016 dan Murni 2017 di Kampung Wogekel**

No.	Jenis Dana	Jumlah (Rp)
1.	DD+ADK Silfa 2016	DD : 492.899.259,- ADK: -
2.	DD 2017	909.919.788,63
3.	ADK 2017	820.309.575,16
4.	Dana Bangsaku	130.496.306,41
	Total	2.353.624.929

Sumber : Hasil Wawancara dan Data diolah 2017

Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang dimiliki masing masing kampung dapat dilihat dari aspek pendidikan dengan tingkat pendidikan yang ditempuh warga masyarakatnya. Penduduk Kampung Wogekel berdasarkan pendidikan yang ditempuh dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4

Jumlah Penduduk Kampung Wogekel Berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak tamat SD	523	486	1.009
2	TK	162	123	285
3	SD	446	209	655
4	SLTP	290	214	504
5	SMA	265	141	406
6	Diploma	9	7	16
7	Sarjana	16	6	22
JUMLAH		1.711	1.186	2.897

Sumber : Data Kampung Tahun 2016

Komposisi penduduk yang mendiami Kampung Wogekel merupakan masyarakat yang berasal dari berbagai suku etnis sehingga kampung ini lebih pluralis. Penduduk kampung juga dikelompokkan ke dalam 2 kelompok besar yaitu suku asli Papua dan non Papua. Penduduk asli di Kampung Wogekel adalah suku asli Papua yaitu Suku Marind. Begitupula dengan keragaman agama yang dianut masyarakat di kampung Wogekel seperti Kristen Katolik, Kristen Protestan, Islam dan Budha. Walaupun hidup dalam keragaman tetapi mereka hidup rukun dan damai, saling menghormati, dan toleransi antar umat yang harmonis. Ikatan kebersamaan dan kekeluargaan sangat mendalam menjadikan salah satu kampung yang terpencil dan sederhana tetapi mempunyai makna yang sangat indah.

Jenis Usaha

Jenis Usaha yang akan dikembangkan atau akan dilaksanakan dapat dilihat dari komposisi persentase aktivitas mata pencaharian penduduk di masing-masing kampung untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat kampung. Untuk Kampung Wogekel yang memiliki mata pencarian utama adalah nelayan. Hal ini dapat dilihat di dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	-	-	-
2	POLRI	-	-	-
3	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	-	3	3
4	Pelajar / Mahasiswa	489	418	907
5	Mengurus Rumah Tangga	-	691	691
6	Tani	116	6	122
7	Nelayan	371	-	371
11	Swasta	330	-	330
12	Wiraswasta	4	-	4
13	Tidak bekerja	35	16	51
JUMLAH		1.345	1.134	2.479

Sumber: Data Hasil sensus Penduduk Kampung Wogekel tahun 2014

Potensi Ekonomi Kampung Wogekel

Kampung Woegekel sangat strategis untuk pengembangan daerah perikanan, persawahan, palawija dan sayur-sayuran, dan pengembangan usaha- usaha rumah tangga. Namun disayangkan sampai dengan saat ini belum ada pembinaan yang mampu membangun kemandirian untuk warga masyarakat, sehingga tidak terlalu banyak menikmati potensi sumber daya yang ada.

Penduduk Kampung Wogekel bermata pencaharian nelayan, bertani dan berburu. Kegiatan sebagaimasyarakat nelayan sudah mulai menggunakan jaring kakap untuk menangkap ikan dipinggir laut (pantai) dan jaring kecil untuk dirawa-rawa. Dalam kegiatan bertani masyarakat sebagian besar menanam sing kong / ubi kayu sayur-sayuran hal itu dipilih karena mudah dalam penanaman dan perawatan, penanam pun ditanam pada pekarangan yang terbatas sekitar rumah. Sedangkan untuk masyarakat berburu biasanya memasang jerat dihutan dan bacok binantang yang mereka dapati dihutan, hasil panen maupun tangkapan digunakan untuk makan sehari-hari dan selebihnya dijual.

Kampung Wogekel memiliki cukup banyak sumber daya alam yang diantaranya adalah :

- Lahan Pertanian dan dusun sagu yang cukup luas
- Hasil Tangkap Laut dan rawa yang melimpah
- Hasil tanaman umbi-umbian, sayur-sayuran dan hasil pangkur sagu yang melimpah.

Hasil Analisa Swot

Analisa dengan melihat faktor internal yang bisa menjadi kekuatan (*strengths*) maupun kelemahan (*weakness*) serta faktor internal yang juga bisa menjadi peluang (*opportunities*) maupun juga dapat menjadi ancaman (*threats*). Metode analisa SWOT ini digunakan pada potensi jenis usaha utama (*core business*) yang akan dikembangkan yaitu usaha penampungan ikan di Kampung Wogekel. Sedangkan potensi usaha lainnya tidak dilakukan metode analisa SWOT namun tetap menjadi alternatif jenis usaha penunjang dalam usaha yang dapat dikelola oleh BUMK nantinya pada masing-masing kampung.

Tabel 6

Analisa SWOT Usaha Penampungan Ikan di Kampung Wogekel

No	Faktor Internal	No	Faktor Eksternal
1.	<p>Kekuatan(<i>Strengths</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tenaga kerja cukup tersedia b. Usia potensial masyarakat pesisir c. Motivasi masyarakat pesisir d. Sumber daya alam sangat tersedia e. Tersedia sarana pelabuhan, depot pertamina. f. Ada kapal tangkap milik kampung <p>Kelemahan (Weakness)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lemahnya permodalan b. Teknologi usaha perikanan masihsederhana c. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang perikanan (listrik, pabrik es, tempat penampungan dan kapal penampung masih dimiliki oleh perusahaan) d. Keterbatasan akses pemasaran e. Kelompok masyarakat pesisir belum terbentuk terutama asosiasi pedagang ikan f. Masyarakat masih dimanjakan oleh alam 	2.	<p>Peluang (Opportunities)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya peluang kesempatan kerja b. Sumber daya alam belum dimanfaatkan secara maksimal c. Koperasi/ BUMK d. Dukungan pemerintah <p>Ancaman (Threats)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Harga ikan rendah b. Cuaca dan musim buruk. c. Masih adanya penangkapan ikan yang tersembunyi (<i>illegal fishing</i>). d. Regulasi pemerintah pusat tentang moratorium belum dicabut
3.		4.	

Berdasarkan hasil analisa SWOT di atas pada bidang usaha penampungan ikan, namun alternatif bidang usaha lainnya yang cukup potensial sebagai usaha penunjang BUMK di Kampung Wogekel seperti:

- Hasil laut seperti Kepiting dan Ikan segar dan ikan Asin
- Garam kasar
- Sembako (distributor sembilan bahan pokok masyarakat kampung)
- Jasa angkutan air (*speed kampung*)
- BBM
- Hasil pertanian seperti: umbi-umbian

D. PENUTUP

Kesimpulan

1. Potensi ekonomi yang dimiliki Kampung Wogekel seperti pengembangan daerah perikanan laut, persawahan, palawija dan sayur-sayuran, dan pengembangan usaha- usaha rumah tangga.
2. Jenis usaha utama yang berpotensi untuk dikelola oleh BUMK di Kampung Wogekel yaitu penampungan ikan hasil tangkapan nelayan.
3. Pemerintah dan masyarakat Kampung Wogekel sangat antusias dan berkomitmen mendukung terbentuknya BUMK secepatnya.

Saran-Saran

1. Diharapkan segera membahas penyusunan Peraturan Kampung tentang Pendirian, Pengelolaan dan Pembubaran BUMK untuk membentuk BUMK.
2. Sosialisasi tentang pentingnya BUMK, pendidikan dan pelatihan tenaga teknis secara berkesinambungan untuk meningkatkan SDM yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten.
3. Kerjasama terpadu dari semua pihak /kemitraan / *stakeholders* untuk mendorong BUMK. Komitmen antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Kampung, Masyarakat tentang pembentukan BUMK.
4. Perlu evaluasi ulang kebijakan moratorium terhadap aktivitas perusahaan yang berimbas pada percepatan roda ekonomi di Kampung Wogekel dan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] L. Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi ke e. Yogyakarta: STIE YKPN, 2004.
- [2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. jakarta, 2014.
- [3] J. S. Pakaya, “Pemberian Kewenangan Pada Desa dalam Konteks Otonomi Daerah,” *J. Legis. Indones.*, vol. Vol. 13 No, 2016.
- [4] Z. Ridwan, “Payung Hukum Pembentukan BUMDes,” *Fiat Justitia, J. Ilmu Huk.*, vol. Volume 7 N, 2013.
- [5] U. B. Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes.* malang: Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, 2007.
- [6] M. . Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Cetakan ke. Jakarta: PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- [7] R. A. Prasetyo, “Peranan BUMDdes dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo di Kabupaten Bojonegoro,” *J. Dialekt.*, vol. Volume XI, 2016.